

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Konsep Perdagangan bebas (*free trade*) yang terus menerus dikampanyekan oleh negara-negara liberal dan didukung oleh rezim internasional sejak dari GATT (*General Agreements on Trade and Tariffs*) hingga WTO (*World Trade Organisation*) yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui ekspor ke pasar internasional, pada awal mulanya akan meningkatkan kesejahteraan negara-negara miskin ataupun negara-negara berkembang. Akan tetapi tidak sedikit permasalahan-permasalahan yang sangat krusial dalam konsep perdagangan bebas seperti: masalah penyeragaman ketentuan yang menghilangkan fleksibilitas negosiasi-negosiasi perdagangan antar negara, masalah kompetisi perdagangan yang dapat mengakibatkan tidak meratanya distribusi kesejahteraan, masalah pembagian kerja internasional yang dapat menciptakan ketidak merataan tingkat pendapatan antar negara.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas telah mendorong para pakar maupun aktifis NGOs yang peduli pada masalah kemanusiaan untuk menggagas perlunya konsep perdagangan internasional alternatif yang mencoba memadukan konsep perdagangan dengan isu-isu *human security* seperti hak asasi manusia, perburuhan, konversi lingkungan, dan prinsip-prinsip keadilan, sehingga lahirlah konsep perdagangan adil atau *fair trade*.

Lahirnya perdagangan adil (*fair trade*) didasarkan pada suatu keyakinan bahwa aturan-aturan perdagangan selayaknya dituntun dan didasarkan pada prinsip-prinsip pemerantasan kemiskinan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, sustainabilitas lingkungan.

Perdagangan bebas (*free trade*) adalah suatu konsep perdagangan internasional yang mencoba memberikan jaminan bahwa produsen di negara-negara miskin mendapat kontrak-kontrak yang adil (*fair deal*) yang mencakup harga yang pantas bagi produk-produk mereka, kontrak-kontrak pembelian jangka panjang, dukungan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan, dan peningkatan produksi.

Konsep Perdagangan adil (*fair trade*) sendiri awal mulanya dikampanyekan oleh Oxfam Inggris Raya di berbagai negara termasuk Indonesia pada dekade 1970-an. Di Indonesia sendiri Oxfam Inggris Raya hadir sebagai sebuah LSM yang berjuang mempromosikan konsep perdagangan adil di Indonesia yaitu dengan memprakarsai perdagangan alternatif yang lebih adil untuk menekan tingkat kemiskinan di Indonesia akibat konsep perdagangan bebas.¹

Di Yogyakarta perkembangan perdagangan adil menurut penulis nampaknya belum berkembang secara maksimal. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang peranan Oxfam Inggris Raya dalam perkembangan perdagangan adil di Yogyakarta di tahun 2003.

¹ Janet Parker, Fair Trade: a Cover for First World Protectionism, <http://www.greenleft.org.au/back/2000/427/427p16.htm>, diakses tanggal 5 Juli 2007.

B. Latar Belakang Masalah

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1 sama berat 2 tidak memihak 3 berpihak pada yang benar 4 berpihak pada yang benar² Adil secara umum adalah perlakuan sesuai dengan apa yang telah dilakukan seseorang.³ Adil tidak berarti harus sama rata, karena hasil kerja yang telah dilakukan setiap orang berbeda-beda sehingga apa yang diperolehnya juga harus memperoleh imbalan yang berbeda. Contoh adil dalam perdagangan adalah dalam proses jual beli suatu barang maka akan dikatakan adil apabila pihak penjual dan pihak pembeli sama-sama memperoleh keuntungan. Artinya, pihak pembeli meskipun terkadang memiliki kekuasaan untuk menentukan harga, diharapkan tidak membeli barang dengan harga yang terlalu murah karena akan merugikan penjual. Harga yang dibayarkan selayaknya sesuai dengan kualitas barang.

Zulian Yamit lebih lanjut menjelaskan bahwa adil merupakan hal yang harus diterapkan dalam perdagangan. Perdagangan adil menurut Yamit adalah perdagangan yang dilakukan dengan adanya upaya saling menguntungkan dan pemberian kesempatan kepada usaha kecil untuk mengembagkan dirinya.⁴ Perdagangan dikatakan tidak adil apabila hanya salah satu pihak yang diuntungkan sementara pihak lain mengalami kerugian.

² Tim Penyusun Kamus Pusat . ed 3,,2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta : Balai Pustaka, Hal.8.

³ James Engel, F, Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard, 1994, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Binarupa Aksara, Hal.41.

⁴ Zulian Yamit, 2001, *Manajemen KualitasProduk dan Jasa*, Yogyakarta: Ekonisia, Hal.22.

Kondisi perdagangan di Yogyakarta secara umum kurang dapat dikatakan adil. Hal itu dapat dilihat dari umumnya hanya ada salah satu pihak dalam proses perdagangan yang mengalami keuntungan sementara pihak lain dirugikan. Para individu yang memiliki kekuasaan untuk memainkan harga pasar, terus berusaha menekan pedagang kecil agar individu tersebut dapat membeli barang dengan harga yang murah tanpa memikirkan kerugian yang diderita pedagang kecil. Kondisi tersebut apabila terus dibiarkan tentu akan membuat pengusaha besar semakin berkembang sementara pengusaha kecil akan terabaikan.

Globalisasi ekonomi yang mulai merambah dunia sejak dekade 1980-an menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi suatu negara dibangun diatas struktur perekonomian yang mengandung beberapa karakter: (1) negara tersebut harus membuka diri terhadap perdagangan internasional; (2) negara tersebut menerapkan sistem pasar secara konsisten untuk mendukung keterlibatannya dalam pasar global; (3) negara tersebut berkonsentrasi pada sektor industri yang memiliki nilai tambah relatif tinggi. Hingga akhir dekade 1970-an, ketiga karakter tersebut sangat melekat pada negara-negara maju di belahan bumi yang mendominasi pasar dunia. Jika negara-negara berkembang di belahan bumi bagian selatan ingin mengikuti jejak langkah mereka maka mereka pun harus mengikuti dalam perekonomian mereka. Sekalipun tidak terlihat sebagai sesuatu yang adil jika semua negara berkembang harus mengikuti jejak negara maju dalam mengatur strategi perekonomian mereka, tampaknya hukum yang berlaku dalam proses globalisasi ekonomi adalah

keterbukaan ekonomi, mekanisme pasar dan penguasa pangsa pasar sektor–sektor dengan nilai tambah relatif tinggi.

Dengan demikian globalisasi ekonomi yang sarat dengan agenda liberalisasi masih merupakan persoalan yang belum tuntas untuk diperdebatkan. Tampak jelas bahwa walaupun ada unsur nilai yang dibawa oleh globalisasi, maka nilai itu adalah perdagangan bebas dan kompetisi. Didalam konteks teori keadilan, nilai yang dianut globalisasi menekankan pada pemberian hak absolut bagi setiap individu dimana surplus ekonomi didistribusikan berdasarkan prestasi (*merit*), usaha (*effort*) dan kontribusi (*contribution*). Dengan demikian, di dalam pasar bebas, mereka yang mencatat prestasi terbaik, usaha paling keras dan kontribusi terbesar cenderung berhak berhak mendapat bagian terbesar dari surplus ekonomi. Sebaliknya mereka yang kurang berprestasi, sedikit berusaha dan memberi kontribusi terkecil hanya berhak atas sebagian kecil saja. Prinsip semacam inilah yang dalam kurun waktu puluhan tahun diperjuangkan GATT (yang kemudian diadopsi oleh WTO sejak 1995) sebagai prinsip utama perdagangan internasional.⁵ Selain dari pada itu praktik konsep perdagangan bebas yang merupakan agenda globalisasi mengandung berbagai unsur *unfairness* (ketidakadilan) yang meliputi:

1. Kemampuan Perusahaan Multi–Nasional (PMN) dalam mengaitkan para produsen di negara-negara berkembang dengan para konsumen negara-negara maju tidak hanya menciptakan peluang bagi pertumbuhan

⁵ *Ibid*

perekonomian negara-negara berkembang, tetapi juga peluang bagi proses eksploitasi, dimana para konsumen di negara-negara maju yang lebih kuat tampil sebagai “*price setters*” (pihak yang menetapkan harga), sementara produsen yang lemah di negara-negara berkembang hanya bertindak selaku “*price takers*” (pihak yang harus menerima penetapan harga).

2. Keuntungan dari perdagangan internasional tidak bersifat otomatis dan pertumbuhan ekspor secara cepat tidak selalu menjamin pengurangan kemiskinan. Bagi negara yang mampu berkonsentrasi pada produk-produk dengan *value-added* tinggi (*technology and capital-intensive*), peningkatan ekspor akan secara otomatis meningkatkan standar hidup rakyat. Namun bagi negara-negara bergantung pada produk dengan *value-added* rendah (*primary products and labour-intensive*), peningkatan ekspor tidak selalu mengangkat derajat hidup anggota masyarakatnya, terutama mereka yang berada dalam kategori miskin dan terbelakang.
3. Pada kebanyakan negara berkembang, peningkatan ekspor seringkali “harus” dengan eksploitasi terhadap kaum pekerja. Di Cina dan Bangladesh, misalnya buruh perempuan yang bekerja di wilayah *Export Processing Zones* (EPZs) harus bekerja sekitar 12 jam sehari dengan kondisi yang buruk. Jika keadaan seperti ini, maka aktivitas ekspor berpotensi untuk melanggar hak-hak asasi kaum buruh.
4. Khusus untuk sektor pertanian, penerapan tarif oleh negara-negara maju telah menghambat ekspor produk pertanian negara-negara berkembang. Karena itu akses pasar bagi produk pertanian negara-negara berkembang

perlu makin dibuka lebar dengan memperhatikan prinsip “perdagangan demi pemberantasan kemiskinan“.

5. Tidak dapat dipungkiri bahwa liberalisasi dapat menciptakan kesenjangan. Sebuah upaya” mulia” oleh IMF dan Bank Dunia yang melalui *Poverty Reduction Strategy Papers* (PRSPs) mencoba untuk mendialogkan agenda perdagangan bagi kaum miskin dengan pemerintahan negara-negara berkembang. Namun demikian, dalam prakteknya liberalisasi perdagangan dan *Structural Adjustment Programmes* (SAPs) yang diterapkan IMF dan Bank Dunia ternyata sangat tidak berpihak kaum miskin, terutama rekomendasi penghapusan subsidi yang makin mencerat kaum marjinal.
6. Karena harga komoditi primer makin memburuk dibandingkan dengan lonjakan harga produk manufaktur, maka negara penghasil komoditas primer akan semakin kehilangan *purchasing power* (daya beli) negara industri.

Melihat begitu banyaknya ketidakadilan dalam konsep perdagangan bebas, Oxfam Inggris Raya sebagai sebuah NGO internasional yang mencoba menyuarakan “*the voices of the voiceless*” mencoba untuk mencari alternatif bagi rezim perdagangan bebas yang diatur secara kaku tetapi sekaligus juga mengandung unsur dualisme (*double standards*). Dalam kaitan ini Oxfam Internasional mencoba mengusulkan gagasan “*fair trade*” (perdagangan yang adil) yang di dalamnya terkandung unsur–unsur penting sebagai berikut:

- Pembukaan akses pasar internasional bagi negara-negara miskin dan penghentian praktek dumping produk pertanian oleh negara-negara besar.

- Penghentian pemberlakuan kondisionalitas oleh IMF dan bank Dunia yang memaksa negara-negara miskin untuk melakukan liberalisasi perdagangan yang dapat memarjinalkan kaum miskin.
- Menciptakan lembaga komoditas internasional untuk menghindari suplai berlebihan (*over supply*) dan penetapan harga komoditas pertanian yang memperhatikan standar hidup produsen.
- Membuat ketentuan-ketentuan *intellectual property* yang dapat menjamin negara-negara miskin untuk ikut menikmati teknologi baru.khususnya dalam bidang pengobatan.
- Mencegah keluarnya undang-undang yang memaksa pemerintah untuk meliberalisasi atau memprivatisasi pelayananan umum yang vital bagi kepentingan kaum miskin.
- Mendemokratisasi WTO untuk memberikan suara lebih besar kepada negara-negara miskin.

Oxfam Inggris Raya adalah lembaga swadaya masyarakat swasta penyedia dana dari inggris. Lembaga ini berawal dari gerakan amal skala kecil untuk membantu orang yang kelaparan dengan nama komite oxford untuk bantuan kelaparan. Pada tahun 1942, selama perang dunia ke II, Yunani diduduki NAZI, sekutu melakukan blokade sehingga rakyat kekurangan makan, obat-obatan dan akibatnya banyak orang yang mati di jalanan. Komite itu mendapatkan sumbangan untuk membantu Yunani pada tahun 1943,namun setelah perang berakhir, Oxfam memutuskan untuk tetap membantu

penderitaan akibat perang atau karena sebab lain dan memulai membuka toko, amalnya yang pertama di Broad Street, Oxford.⁶

Pada dekade tahun 1962 orientasi Oxfam bertambah yaitu dengan memberikan sumbangan yang diarahkan pada masyarakat miskin pada dunia ketiga. Selama kelaparan di Bihar India (1966-1967) Oxfam mengirimkan sukarelawan dan mulai menolong masyarakat agar mandiri yaitu dengan memperbaiki sistem pengairan, pertanian dan kesehatan mereka.⁷

Pada tahun 1970 jaringan bisnis toko Oxfam berkembang pesat dan menjadi sumber dana utama bagi lembaga amalnya. Di kemudian hari, berdirilah lembaga-lembaga Oxfam di Amerika Serikat, Kanada, Quebec, Australia, Belgia, Hongkong, Irlandia dan Inggris yang masing-masing berdiri sendiri tapi terikat dengan jaringan Oxfam Internasional.

Oxfam Internasional mencatat beberapa “fakta” yang menunjukkan bahwa partisipasi negara berkembang di dalam perdagangan internasional tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh penganut sistem perdagangan bebas, yakni:

- Fakta bahwa “kesuksesan” negara-negara pengekspor hanya terkonsentrasi di kawasan Asia Timur dimana kawasan tersebut mendominasi sekitar 75 % dari total ekspor negara-negara berkembang.
- Fakta bahwa kebanyakan ekspor negara-negara berkembang bertumpu pada produk-produk kualitas rendah dan *labour intensive* sehingga tidak memiliki nilai tambah tinggi. Dalam jangka panjang, prospek keuntungan

⁶ Stuart Hodgkinson, Gagalkan WTO, <http://www.gn.apc.org/dte>, diakses tanggal 17 Juli 2007.

⁷ *Ibid*

negara-negara berkembang di dalam perdagangan internasional menjadi sangat terbatas.

- Fakta bahwa kebanyakan ekspor negara-negara berkembang adalah dari sektor komoditi primer yang tingkat kenaikan harganya sangat lambat jika dibandingkan produk manufaktur.

Di Indonesia sendiri Oxfam telah beroperasi sejak tahun 1972. Pada mulanya lembaga ini mengkonsentrasikan kegiatan-kegiatannya pada wilayah: Jawa, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi Indonesia yang acap kali terlihat adanya kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, ketimpangan antara jawa dan luar jawa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, tertutupnya akses pasar bagi kaum miskin, eksploitasi oleh salah satu sektor ekonomi terhadap sektor lain, maka Oxfam kemudian hadir di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Sesuai dengan misi utamanya sebagai organisasi yang memfokuskan pada bantuan kemanusiaan Oxfam Inggris Raya Indonesia mengkonsentrasikan pada beberapa kegiatan utama, yakni (1) Penanggulangan bencana (*disaster management*); dan (2) program aksi kemanusiaan (*Humanitarian action programme*). Dengan demikian, tampak jelas bahwa lembaga ini pada dasarnya berawal dari *spirit relief*, yakni suatu semangat untuk meringankan beban kaum miskin yang terhimpit oleh bencana alam dan berbagai kesulitan ekonomi mendasar lainnya. Maka, para *beneficiaries* (kelompok dampingan) lembaga inipun menjadi sangat bervariasi, yakni petani miskin, nelayan miskin, suku terasing,

kaum miskin perkotaan, masyarakat terbelakang, produsen kecil, perempuan, anak-anak, serta pengungsi.

Oxfam Inggris Raya Indonesia mempunyai program di beberapa daerah di Indonesia sebagai berikut:

1. Mengembangkan hak dasar perekonomian masyarakat termasuk akses dan kontrol nya terhadap sumber daya alam di Flores, Maluku, Timor Leste, dan Sumba.
2. Pengenalan dan pengembangan pertanian organik di pulau Jawa
3. Program perempuan, dengan melakukan program “engendering “ yang difokuskan pada organisasi dan program-program mitra Oxfam
4. Mendukung pengembangan dan peningkatan kemampuan serta integritas LSM di Indonesia
5. Membantu produsen yang marginal untuk mendapatkan akses dalam perdagangan yang adil.

Kegiatan Oxfam saat ini tidak hanya di Jawa, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur saja namun juga di Yogyakarta. Di Yogyakarta, Oxfam berusaha menjalankan perdagangan adil.

C. Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah peran Oxfam Inggris Raya dalam mengembangkan perdagangan adil di Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui asal mula isu Perdagangan adil (*fair Trade*) di Dunia.
2. Untuk mengetahui perkembangan LSM perdagangan adil (*fair trade*) Indonesia seiring dengan datangnya isu Perdagangan adil (*fair trade*) di Indonesia.
3. Untuk mengetahui peranan Oxfam Inggris Raya dalam perkembangan perdagangan adil di Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta pada khususnya.
4. Menerapkan teori-teori yang pernah penulis dapatkan selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Untuk Memenuhi prasyarat guna memperoleh gelar S-1 jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

E. Dasar Pemikiran

Dalam menjawab rumusan masalah diatas, bangsa-bangsa di dunia tidak dapat terlepas dari keberadaan bangsa lain, tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada diri sendiri dan tidak mampu menghalangi penetrasi dari luar yang dapat berwujud gagasan, kekuatan ekonomi, tekanan kultural, bahkan intervensi militer.

Perdagangan internasional merupakan hal yang tidak mungkin dapat terelakkan lagi saat ini. Setiap negara membutuhkan negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Hal itu menjadikan adanya kebutuhan negara untuk saling melakukan ekspor dan impor melalui perdagangan.

Menurut **Teori Keunggulan Komparatif dari J.S. Mill** adalah bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif (*comparatif advantage*) terbesar, dan akan mengkhususkan diri pada impor barang bila negara tersebut memiliki kerugian komparatif (*comparatif disadvantage*). Atau, suatu negara akan melakukan ekspor barang, bila barang itu dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah, dan akan melakukan impor barang, bila barang itu dapat diproduksi sendiri akan memerlukan biaya lebih tinggi.⁸

Teori perdagangan internasional menjelaskan bahwa setiap negara "mau tidak mau" terlibat dalam perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.⁹ Contohnya suatu negara memiliki hasil panen gandum yang berlimpah. Negara tersebut akan menjual hasil panennya kepada negara lain untuk mendapatkan uang sebagai hasil kerjanya. Harga gandum itu sendiri tidak dapat ditentukan oleh penjual, namun yang menentukan adalah pasar internasional. Berdasarkan contoh tersebut dapat

⁸ Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran : teori dan temuan empiris*, Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 2000, hal.25

⁹ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.85.

dipahami bahwa bagaimanapun suatu negara tidak dapat melepaskan diri dari perdagangan internasional.¹⁰

Negara-negara berkembang sebagai negara yang tidak memiliki modal besar, juga terlibat dalam perdagangan internasional. Negara berkembang tidak dapat berbuat banyak dalam perdagangan internasional karena keterbatasan modal yang dimilikinya. Negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Cina, Jepang, serta negara besar lainnya, akan lebih berperan aktif dalam perdagangan internasional.¹¹

Perdagangan internasional akan sangat dipengaruhi oleh negara-negara yang memiliki modal besar, yang berarti bahwa negara-negara majulah yang akan selalu aktif dalam perdagangan internasional. Negara-negara tersebut akan begitu banyak mempengaruhi harga suatu barang sementara negara berkembang atau negara kecil hanya dapat pasif menjalani apa yang telah menjadi keputusan dalam perdagangan internasional.

Dampak lebih lanjut dari perdagangan internasional adalah para pengusaha kecil sering mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Pedagang kecil yang ada dalam suatu negara hanya dapat menyediakan barang namun tidak memiliki *power* untuk menentukan harga sehingga hanya dapat menerima berapapun harga yang telah ditentukan oleh pasar. Contohnya adalah para petani yang hanya dapat menjual hasil pertaniannya tanpa punya kekuasaan untuk menentukan harga hasil pertaniannya. Kerugian sering

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Media Indonesia*, Menggagas Kedaulatan Individu, 26 Desember 2003.

dialami petani karena harga hasil pertaniannya yang kurang dihargai oleh pembeli.¹² Hal itu menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam perdagangan sering terjadi yang mengakibatkan terbengkalainya pengusaha kecil yang ada termasuk di Indonesia.

Ketidakadilan yang sering terjadi menyebabkan Oxfam tidak tinggal diam. Oxfam berusaha membantu mewujudkan perdagangan adil. Perdagangan adil yang dilakukan Oxfam dimaksudkan agar antara pembeli dan penjual sama-sama diuntungkan sehingga tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan.

Adanya konsep perdagangan adil dapat membantu Indonesia dari upaya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara-negara maju. Konsep perdagangan adil berupaya untuk membantu negara berkembang memperoleh jaminan bahwa produsen di negara-negara tersebut mendapat kontrak-kontrak yang adil (*fair deal*) yang mencakup harga yang pantas bagi produk-produk mereka, kontrak-kontrak pembelian jangka panjang, dukungan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan, dan peningkatan produksi.

Teori penanaman modal, oleh Alan M. Rugman didefinisikan sebagai “*the factors which determine the foreign investment variable and internationalization variable*”. Teori ini menyebutkan bahwa, penanaman modal asing dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

¹² Alan M. Rugman, *Internasional Business, Form and Environment*, Mc Graw Hill Book, New York, 1985, Halaman 73-92.

Faktor internal dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu unsur politik dan unsur non politik (letak geografis, kondisi sosial dan ekonomi) sedangkan **faktor eksternal**, terkait dengan keunggulan spesifik dari satu negara dibandingkan dengan negara lainnya.¹³

Adanya konsep perdagangan adil dapat membantu Indonesia dari upaya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara-negara maju. Konsep perdagangan adil berupaya untuk membantu negara berkembang memperoleh jaminan bahwa produsen di negara-negara tersebut mendapat kontrak-kontrak yang adil (*fair deal*) yang mencakup harga yang pantas bagi produk-produk mereka, kontrak-kontrak pembelian jangka panjang, dukungan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan, dan peningkatan produksi.

F. Hipotesa

Hipotesa dari rumusan masalah adalah peran Oxfam Inggris raya dalam mengembangkan sistem perdagangan adil di Yogyakarta sebagai penyandang dana, membantu manajemen produksi, dan manajemen pemasaran di pasar *fair trade* internasional.

G. Jangkauan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dan guna menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka penulis mengambil Jangkauan Penelitian tahun 2003. Hal ini karena, pada tahun 2003 Oxfam Inggris Raya bekerja sama

¹³ Alan M. Rugman, *Internasional Business, Form and Environment*, Mc Graw Hill Book, New York, 1985, Halaman 73-92.

dengan SAHANI (sektor pertanian organik), APIKRI (sektor kerajinan). Selain itu di Indonesia banyak bermunculan LSM yang berkaitan dengan perdagangan alternatif ini, khususnya produksi kerajinan dan pertanian organik.

H. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi studi atas berbagai literatur, jurnal, majalah, dan surat kabar yang memuat info tentang Oxfam Inggris Raya dalam perkembangan perdagangan adil (*fair*) trade di Indonesia.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun Sistematika dari penulisan ini ditulis dalam lima bab dengan sub topik pembahasan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada BAB I memuat Pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, dasar pemikiran, jangkauan penelitian, hipotesa, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II. ISU PERDAGANGAN ADIL SEBAGAI RESPON TERHADAP GLOBALISASI

Menjelaskan tentang globalisasi sebagai penyebab terjadinya perdagangan bebas, proses munculnya perdagangan adil (*fair trade*), serta aktor-aktor yang terlibat dalam terbentuknya perdagangan adil (*fair trade*).

BAB III. PERKEMBANGAN LSM PERDAGANGAN ADIL DI INDONESIA PERIODE 2003

Pada bab ini akan memaparkan tentang latar belakang munculnya LSM *fair trade* di Indonesia dan perkembangannya dari tahun 2000-2003.

BAB IV. OXFAM INGGRIS RAYA INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN PERDAGANGAN ADIL DI YOGYAKARTA

Pada bab ini akan dipaparkan perkembangan, program, dan upaya-upaya Oxfam Inggris Raya di Indonesia sebagai LSM dari Inggris yang membawa misi perdaganga alternatif di Indonesia pada umumnya dan di Yogyakarta pada khususnya.

BAB V. KESIMPULAN

Akan berisi penutup, yang merupakan kesimpulan dari bab-bab terdahulu.